

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Sejalan dengan pembangunan ekonomi saat ini, Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota di Indonesia dipercayakan oleh pemerintah pusat untuk mengatur daerahnya sendiri yaitu dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah dapat menggali dan memperdayagunakan potensi daerah sebagai penerimaan daerah. Sehubungan dengan pemberian tugas dan wewenang oleh pemerintah pusat kepada daerah, pemerintah daerah dapat membentuk perusahaan daerah dengan menanamkan sebagian atau seluruh sumber modal perusahaan daerah berasal dari keuangan daerah dengan tujuan dapat memberikan keuntungan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam memajukan otonomi daerah, pemerintah daerah melakukan berbagai usaha termasuk berbagai perusahaan-perusahaan daerah, perusahaan daerah tersebut dapat membantu perekonomian daerah sebab perusahaan daerah merupakan agen pembangunan daerah dalam sektor ekonomi yang bergerak dalam bidang pelayanan publik. Semakin baik pelayanan yang diberikan kepada publik oleh perusahaan, sudah tentu

perusahaan tersebut berkembang dan dapat memberikan kontribusi kepada pendapatan daerah.

Pengelolaan perusahaan yang baik perlu didukung dengan beberapa sistem yang mengaturnya, baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendaliannya. Suatu sistem adalah suatu kelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan yang lain yang berfungsi sama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem diciptakan untuk menangani sesuatu yang berulang kali atau yang secara rutin terjadi (Mulyadi, 2001:2-3). Mulyadi menambahkan bahwa Penerapan sebuah sistem dalam suatu perusahaan untuk menangani dan mengatur jalannya semua aktivitas perusahaan yang baik yang bersifat operasional maupun nonoperasional sangatlah penting. Salah satu sistem yang digunakan perusahaan adalah sistem akuntansi, sistem akuntansi adalah organisasi, formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan.

Setiap perusahaan atau badan usaha selalu membutuhkan tenaga kerja manusia dalam hal ini adalah karyawan. Karyawan merupakan orang pribadi yang dipekerjakan dalam perusahaan (pemberi kerja) yang melakukan pekerjaan berdasarkan suatu perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis (Soemaroso, 1999:354). Peran serta seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sangat mendukung suatu pencapaian tujuan perusahaan, untuk pencapaian tujuan perusahaan perlu adanya kerjasama

antara bagian-bagian yang terkait agar menghasilkan informasi tepat dan akurat sehingga pihak manajemen dapat mengambil keputusan. Untuk dapat memacu kinerja perusahaan dengan baik maka karyawan yang dipekerjakan oleh perusahaan membutuhkan adanya balas jasa dari perusahaan berupa kompensasi atau gaji kepada karyawan.

Jusuf Haryono (2005:239) Mengemukakan bahwa kewajiban perusahaan kepada karyawan dalam bentuk upah dan gaji yang belum dibayar, kadang-kadang cukup besar jumlahnya. Lebih-lebih dalam perusahaan yang memiliki tenaga kerja yang banyak jumlahnya. Biaya gaji seringkali mencerminkan jumlah yang cukup besar bila dibandingkan dengan jenis biaya yang lain, selain gaji perusahaan biasanya juga memberikan berbagai kompensasi berupa tunjangan seperti tunjangan kesehatan, tunjangan asuransi, dan tunjangan lainnya. Dengan adanya berbagai komponen yang harus dibayarkan kepada karyawan, maka diperlukan akuntansi penggajian yang tepat disertai dengan pengawasan yang memadai. Jusuf juga menambahkan bahwa akuntansi penggajian tidak semata-mata menyangkut soal pembayaran gaji atau upah kepada karyawan, perusahaan juga mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan administrasi penggajian untuk setiap karyawan, termasuk juga data pajak penghasilan setiap karyawan.

Sistem penggajian dikoordinasi sedemikian rupa menjadi sistem akuntansi penggajian. Sistem akuntansi penggajian meliputi: dokumen yang digunakan, catatan yang digunakan, laporan yang dihasilkan, fungsi yang

terkait, jaringan prosedur yang membentuk sistem, dan pengendalian intern. Sistem akuntansi yang baik dalam perusahaan melibatkan unsur yang paling penting yaitu fungsi kepegawaian, fungsi pencatat waktu, fungsi pembuat daftar gaji, fungsi akuntansi dan fungsi keuangan. Fungsi tersebut bekerja sama menghasilkan sebuah laporan yaitu laporan biaya gaji, laporan prestasi karyawan dan laporan prestasi departemen, laporan tersebut digunakan penentuan jumlah gaji.

Suatu perusahaan sebaiknya mempunyai sistem penggajian yang baik dan jelas karena apabila perusahaan tersebut tidak memiliki sistem penggajian yang baik akan menyebabkan terjadinya penyelewengan atau penyimpangan didalam melaksanakan tanggung jawab masing-masing. Agar tidak terjadi penyimpangan maupun penyelewengan maka harus dilakukan pemisahan tugas antar bagian yang terkait dengan tujuan menghindari persekongkolan, untuk menghindari jumlah gaji yang dibesarkan dan untuk memudahkan pekerjaan berbagai petugas yang disertai tugas perhitungan gaji.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Belu dalam hal penyediaan kebutuhan air minum, maka sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah maka keberadaan Badan Pengelola Air Minum perlu ditinjau oleh pemerintah daerah. Berkaitan dengan hal tersebut Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Belu merupakan salah satu badan usaha milik daerah yang dibentuk oleh pemerintahan daerah Kabupaten Belu

berdasarkan Peratran Daerah Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Belu. Dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah maka peranan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD). Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Dalam melaksanakan operasi perusahaan diperlukan adanya manajemen perusahaan yang baik dengan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat berkarya secara efisien, jadi unsur penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan adalah sumber daya manusia.

Dalam suatu perusahaan sumber daya manusia merupakan faktor dominan yang harus diperhatikan oleh perusahaan dibandingkan dengan faktor-faktor lain. Sumber daya manusia sangat memiliki peranan besar dalam perusahaan yaitu karyawan yang bekerja memajukan perusahaan dan pelayanan kepada publik, oleh karena itu perusahaan wajib memberikan kompensasi-kompensasi kepada sumber daya manusia tersebut. Imbalan kerja yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja salah satunya adalah memberikan gaji kepada karyawan serta kompensasi lainnya sehingga dapat menjamin kesejahteraan karyawan.

Dengan berbagai kompensasi yang diberikan maka perusahaan perlu menerapkan sistem dan prosedur dalam pembayaran gaji, salah satunya adalah sistem akuntansi gaji agar dapat menjamin ketelitian, penggolongan dan pencatatan yang memadai agar tidak terjadi kekeliruan dalam pembayaran gaji kepada karyawan dan dapat menjamin informasi-

informasi kepada pihak manajemen. Namun dalam hal ini sistem akuntansi yang diterapkan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Belu belum dilakukan secara maksimal diantaranya adalah bagian-bagian yang terkait dengan sistem akuntansi penggajian, prosedur yang membentuk sistem akuntansi, dan dokumen-dokumen yang digunakan. Sehingga mengakibatkan penumpukan pekerjaan dan mempengaruhi pembayaran gaji kepada karyawan yang sering kali terlambat serta dapat menimbulkan komplain antara karyawan dengan perusahaan.

Selain permasalahan tersebut diperoleh informasi bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Belu dalam pembayaran gaji kepada karyawan yang dilakukan oleh bagian personalia, daftar gaji langsung digunakan untuk membayar gaji kepada karyawan, belum dilengkapi dengan dokumen-dokumen dan transaksi lainnya agar dapat mendukung daftar gaji tersebut untuk dibukukan kedalam catatan akuntansi, dengan demikian menimbulkan kesalahan dalam pencatatan oleh bagian pembukuan dan laporan-laporan yang dihasilkan oleh bagian pembukuan tersebut.

Secara teoritis kondisi tersebut akan mengakibatkan informasi-informasi akuntansi yang dihasilkan belum memadai dan mempengaruhi pihak manajemen untuk memperoleh informasi yang akurat dan komprehensif, Hal ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi penggajian pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Belu dalam

penerapannya dilakukan belum secara komprehensif yaitu belum dilengkapi dengan catatan, dan formulir yang memadai.

Berdasarkan pemaparan masalah di atas maka penulis tertarik mengambil Judul tentang “Evaluasi Sistem Akuntansi Penggajian Karyawan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Belu”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang, maka perumusan masalah yang akan dikemukakan sesuai dengan obyek kajian yang diteliti adalah : Bagaimanakah sistem akuntansi penggajian karyawan yang diterapkan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Belu?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan

Untuk mengetahui sistem akuntansi penggajian karyawan yang diterapkan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Belu.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Belu

Sebagai bahan masukan dan informasi bagi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belu dalam hal ini Sistem Akuntansi Penggajian Karyawan, dan dapat digunakan sebagai salah satu cara dalam penyempurnaan sistem akuntansi penggajian yang berkaitan dengan pembayaran gaji karyawan.

2. Bagi Peneliti Lainnya

Sebagai bahan atau informasi dan referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

3. Bagi Penulis

- a. Sebagai sarana dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan terutama dalam hal mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi khususnya sistem akuntansi penggajian karyawan.
- b. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.